



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**RANCANGAN RENCANA KERJA
KECAMATAN RAKIT
TAHUN 2024**

**KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Renja Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Rancangan Awal Renja tersebut berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Kecamatan Rakit Tahun 2023-2026, dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, Juli 2023


PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN RAKIT
PIL. CAMAT RAKIT

SITI IZZATI, S.Sos
Penata Tk.I
NIP.19710310 199311 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	33
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara	16
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara	22
Tabel 2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara	26
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara	31
Tabel 2.6.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara	31
Tabel 3.3.	Program dan Kegiatan	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan

berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

- Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun

2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 4 program, 7 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 2.146.211.558,-**, dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
- b. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;

- c. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
- d. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
- e. Belum optimalnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
- f. Masih terbatasnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
- g. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

Dari 4 program, 7 kegiatan, dan 17 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 4 program, 7 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.146.211.558,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 7 kegiatan, dan 17 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 2.007.230.479,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi 1 Program.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target. Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan. Program kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan dan penyelarasan target kinerja dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang baik;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing -masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai.
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.
5. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada dasarnya semua program dan kegiatan pada tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan kinerjanya agar sesuai dengan indikator kinerja.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		2 paket	-	-	-			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi		7 orang	-	-	-			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi		2 paket	-	-	-			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		8 paket	-	-	-			
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran(PTT)/Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor	Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terbayar		2 orang	-	-	-			
	Pemberdayaan Kecamatan	Jumlah desa yang tertib administrasi		11 desa	-	-	-			
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terpenuhin ya sarana								

		prasarana aparatur								
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah dinas yang terpenuhi		-	-	-	-			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		6 paket	-	-	-			
	Pemeliharaan Rutun/bekala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas yang terpenuhi		-	-	-	-			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		3 unit	-	-	-			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		5 paket	-	-	-			
	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi		-	-	-	-			
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparat yang telah memahami PATEN								
	Asistensi PATEN	Jumlah permohonan		100	-	-	-			

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKM	84,34	81,65	81,50	81,50	100	82,50	82,50	100 %
		Nilai SAKIP	B/63	C	B	CC	CC	B	B	B
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Rakit)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.510.000/6 dok	-	6 dokumen	6 dokumen	100	-	-	-
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	1.850.000/6 laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100	-	-	-

		ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.842.315.372/ 17 ASN	-	17 ASN	17 ASN	100	17 ASN	17 ASN	100%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	39.720.000/ 8 Orang	-	5 Orang	5 Orang	100	8 Orang	8 Orang	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	2.700.000/7 dok	-	7 dok	7 dok	100	-	-	-

		wulanan/Se mesteran SKPD								
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administra si Umum perangkat daerah								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan	5.000.000/ 2 Paket	-	-	-	-	-	-	-
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	73.842.600/ 12 Paket	100 %	12 Paket	12 Paket	100	8 Paket	8 Paket	100%
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah								
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3.500.000/ 1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan	30.000.000/ 3 Unit	-	-	-	-	-	-	-

		dan Mesin Lainnya yang disediakan								
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	11.500.000/ 12 Laporan	12 bulan	2 Paket	2 Paket	100	2 Pake	2 Paket	100%
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	55.000.000/ 12 Laporan	12 bulan	3 Orang	3 Orang	100	3 Orang	3 Orang	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10.500.000/ 6 Unit	12 bulan	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15.000.000/ 1 Unit	-	3 unit	3 unit	100	1 Unit	1 Unit	100%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5.000.000/4 Unit	-	3 unit	3 unit	100	1 Unit	1 Unit	100%
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %							
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Prosentase pelaksanaan urusan								

	Camat	pemerintah an yang dilimpahkan kepada Camat								
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7.200.000/ 2.765 dokumen		-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1.200.000/ 12 Laporan		-	-	-			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	74.000.000/ 1 Laporan	-	100	100	100	5.285 Pemohon	5.285 Pemohon	100%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	Jumlah dokumen Koordinasi/	20.000.000/ 1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

	Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %							
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum								
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	6.050.000/ 1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

		Agama dan Tokoh Masyarakat								
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %							
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.600.000/4 Dokumen	-	4 kali	4 kali	100	4 Kali	4 Kali	100%
D.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %							
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi								

		pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Rakit) ¹	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.050.000/ 1 Dokumen	-	33 perdes	33 perdes	100	11 Desa	11 Desa	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Rakit)	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.050.000/ 1 Dokumen	-	22 berkas	22 berkas	100	11 Desa	11 Desa	100
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset	6.050.000/ 1 Dokumen	-	55 laporan	55 laporan	100	11 desa	11 desa	100

		Desa								
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	30.000.000/ 1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	8.212.000/ 1 Dokumen	-	-	-	-	11 desa	11 desa	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Rakit)	Jumlah dokumen fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	4.800.000/ 1 Dokumen	-	2 dok	2 dok	100	11 Desa	11 Desa	100
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdaya	6.050.000/ 1 Dokumen	-	55 dok	55 dok	100	1 dok	1 dok	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 2 Indikator. Dari 2 indikator tersebut, 1 indikator berstatus dan 1 indikator belum tercapai. Faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Indikator Nilai SAKIP tidak tercapai dengan faktor yang mempengaruhi, antara lain :

1. Belum terpenuhinya materi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan;
2. Sosialisasi dan pendampingan dalam penilaian SAKIP yang masih kurang dari instansi pengampu.
3. Kapasitas SDM yang masih terbatas dalam penyusunan dokumen perangkat daerah.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Lampiran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Cakil

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%		Adanya ASN yang pensiun sehingga anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak terserap 100%	Memohon kebijakan kepada BKD untuk menambah ASN sesuai tupoksi	
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		Kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan meminimalisir penyelewengan dalam	Monitoring dan evaluasi ke desa desa dengan menggalakkan program seperti pring pethuk nabung Bersama selama 1 tahun untuk	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%		penyetoran uang pajak ke bank. Administrasi pemerintahan di desa yang kurang tertib serta penginventarisiran asset desa yang perlu diadakan pembenahan dan sosialisasi pentingnya asset desa.	membayar pajak dengan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi dana desa se kecamatan yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun 2 kali monev.	
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Memecahkan Bersama isu strategis atau permasalahan yang terjadi di kecamatan serta mencari solusi terbaik yang bisa diterima	Adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin seperti sosialisasi tentang PBB dan 12 budaya malu bagi aparat desa.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							semua pihak.		

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan, Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat, peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan sehingga menghambat pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan khususnya dalam pengiriman permintaan data secara tepat waktu.
9. Angka stunting yang masih tinggi.

10. Akses layanan sanitasi layak yang masih kurang, di bawah rata-rata Kabupaten.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja;
2. Tidak tercapainya sasaran kerja;
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan, khususnya dalam pencapaian sasaran pelayanan terhadap masyarakat serta kurang disiplinnya dalam penerapan jam kerja sehingga pelayanan langsung terhadap masyarakat secara umum belum optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Belum optimalnya budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja;

4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat dan meningkatkan pelayanan prima tentunya dengan ramah dan sopan.
5. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas, belum meratanya fasilitas laptop bagi pelaksana dan pejabat struktural, printer, LCD, lemari file., AC, CCTV.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu serta tidak adanya penyelewengan dari petugas pungut pajak yang tidak langsung menyetorkan pembayaran pajak dari masyarakat ke bank.
3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Rakit sehingga pengoptimalan tugas dan fungsi aparatur pemerintah kurang bisa tercapai sehingga menyebabkan kelambanan birokrasi.

4. Kurangnya pagu anggaran di tahun berjalan sehingga tidak semua program kegiatan bisa dilaksanakan secara 100% dan target yang ditentukan juga tidak tercapai 100%.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, anggaran belanja yang dialokasikan untuk Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara diusulkan sebesar Rp 2.213.932.062,- yang terbagi dalam 5 program 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan mulai Tahun 2024. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program kegiatan dan sub kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kecamatan Rakit				2.213.932.062					2.213.000.000	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Rakit	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota yang terlaksana	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2.069.356.322	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Rakit	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ Kota yang terlaksana	Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	2.068.424.260	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Rakit	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	100 %	3.653.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Rakit	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	100 %	3.653.000	
a.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec.Rakit	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	1.508.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec.Rakit	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	1.508.000	

b.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Ra kit	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	2.145.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Ra kit	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	2.145.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Ra kit	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	1.827.408.886	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Ra kit	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	1.827.408.886	
a.	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec.Ra kit	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bln	1.784.692.886	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	Kec.Ra kit	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 org/bln	1.784.692.886	
b.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec.Ra kit	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12 laporan	40.596.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Kec.Ra kit	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12 laporan	40.596.000	

			SKPD			SKPD		SKPD			
c.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec.Rakit	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	2.120.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Kec.Rakit	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	2.120.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Rakit	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	99.110.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Rakit	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%		
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Rakit	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	4.942.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Rakit	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	4.942.200	
b.	Penyedia bahan logistik kantor	Kec.Rakit	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	94.168.500	Penyedia bahan logistik kantor	Kec.Rakit	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	93.236.438	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Rakit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	62.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec.Rakit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	62.500.000	

	Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a.	Pengadaan Mebel	Kec.Ra kit	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	17.500.000	Pengadaan Mebel	Kec.Ra kit	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	17.500.000	
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Ra kit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	45.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Ra kit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	45.000.000	
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ra kit	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	59.092.416	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Ra kit	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	59.092.416	
a.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Ra kit	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	6.000.000	Penyedia jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Kec.Ra kit	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	6.000.000	
b.	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec.Ra kit	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	53.092.416	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Kec.Ra kit	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	12 Laporan	53.092.416	

6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Ra kit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah	100%	17.591.320	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	disediakan Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah	100%	17.591.320	
a.	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec.Ra kit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	10.500.000	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec.Ra kit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	10.500.000	
b.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Ra kit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	2 Unit	3.481.320	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Ra kit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	2 Unit	3.481.320	
c.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec.Ra kit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	4 Unit	3.610.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung	Kec.Ra kit	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	4 Unit	3.610.000	

			bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			gedung kantor atau bangunan lainnya		bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi			
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Rakit	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	77.265.740	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Rakit	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	77.265.740	
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Rakit	Persentase terselenggaranya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	13.029.040	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Rakit	Persentase terselenggaranya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	13.029.040	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Rakit	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	13.029.040	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Rakit	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	13.029.040	

C.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
	Harmobisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Ra kit	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Harmobisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Ra kit	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Ra kit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Sakip Kecamatan	9.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Ra kit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Sakip Kecamatan	9.600.000	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Ra kit	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	9.600.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Ra kit	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	9.600.000	
a.	Pelaksanaan tugas	Kec.Ra	Jumlah	1	9.600.000	Pelaksanaan	Kec.Ra	Jumlah	1Dokume	9.600.000	

	forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	kit	dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Dokumen		n tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	kit	dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan 4 Kali	n		
E.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ra kit	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Nilai Sakip Kecamatan	58.910.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Ra kit	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Nilai Sakip Kecamatan	58.910.000	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Ra kit	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	58.910.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Ra kit	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	58.910.000	
a.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Rakit) ⁱⁱ	Kec.Ra kit	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	11 Dokumen	1.350.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Kecamatan Rakit)	Kec.Ra kit	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan	11 Dokumen	1.350.000	

								Kepala Desa			
b.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Rakit)	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 Dokumen	5.925.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Rakit)	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 Dokumen	5.925.000	
c.	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan penfdayagunaan aset desa	11 Dokumen	0	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec.ra kit	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan penfdayagunaan aset desa	11 Dokumen	0	
d.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yang Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Rakit	Jumlah dokumen yangFasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	25.000.000	
e.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	1 Dokumen	7.260.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Kec.Rakit	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	1 Dokumen	7.260.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	PIK Jalan Rakit - Gelang (Baleraksa)	Desa Rakit	Jalan rusak parah, selalu tertunda karena refocusing		Validasi Mitra Baperlitba ng
2.	Jalan rusak parah, selalu tertunda karena refocusing	Desa Rakit	Jalan Kabupaten sering kebanjiran		Validasi Mitra Baperlitba ng
3.	Penerangan & Marka Jalan Kabupaten Rakit-Bandingan	Desa Rakit	Sering sekali terjadi kecelakaan		Validasi Mitra Baperlitba ng
4.	Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier yang berhulu di Adipasir	Desa Rakit	Saluran rusak parah, bocor ke saluran induk beberapa titik		Validasi Mitra Baperlitba ng
5.	Pengadaan Mebelair SDN 01 Rakit	Desa Rakit	Saluran rusak parah, bocor ke saluran induk beberapa titik		Validasi Mitra Baperlitba ng
6.	Pembangunan	Desa	Gedung TK		Validasi

	gedung TK Pertiwi Desa Rakit	Rakit	rusak		Mitra Baperlitba ng
7.	Bantuan Sosial Pembangunan RTLH	Desa Rakit	Banyak rumah warga belum layak huni		Validasi Mitra Baperlitba ng
8.	Bantuan Jambanisasi	Desa Rakit	Banyak rumah warga belum punya jamban		Validasi Mitra Baperlitba ng
9.	Pembangunan Jalan usaha Tani	Desa Rakit	Jalan usaha tani perlu dibangun		Validasi Mitra Baperlitba ng
10.	PIK Jalan Rakit - Gelang (Baleraksa)	Desa Rakit	Jalan rusak parah, selalu tertunda karena refocusing		Validasi Mitra Baperlitba ng
11.	Perbaikan Drainase selatan PLTMH Desa Rakit - Puskesmas	Desa Rakit	Jalan Kabupaten sering kebanjiran		Validasi Mitra Baperlitba ng
12.	LAMPU JALAN DESA DAN JALAN PROVINSI	Desa Gelang	Masih banyak warga yang kekurangan		Validasi Mitra Baperlitba ng
13.	Pembangunan TROTOAR JALAN RAYA	Desa Desa Gelang	Perlunya Bronjong untuk melindungi tanah agar tidak terjadi longsor		Validasi Mitra Baperlitba ng
14.	Pembangunan Drainase Jalan Raya	Desa Gelang	Karena Tidak adanya drainase,air saat hujan naik ke jalan raya dan membangiri rumah warga		Validasi Mitra Baperlitba ng

15.	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	Desa Gelang	Masih Banyak Masyarakat yang Rumah Tinggalnya Tidak Layak di Huni		Validasi Mitra Baperlitbang
16.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Gelang	Petani Kesusahan Air Saat musim tanam		Validasi Mitra Baperlitbang
17.	Pembangunan Penutup Drainase jalan Raya Gelang-mandiraja	Desa Gelang	Drainase terlalu dalam membahayakan pengguna jalan		Validasi Mitra Baperlitbang
18.	Pembangunan Penutup Drainase jalan Raya Gelang-mandiraja	Desa Gelang	Jalan Sudah Berlobang dan Saluran Irigasi yang rusak membuat Air Naik Ke Rumah Warga		Validasi Mitra Baperlitbang
19.	Pembangunan Betonisasi Jalan Usaha Tani Balairaksa	Desa Gelang	Jalan Yang Masih Bertanah, Membuat petani susah membawa hasil panen		Validasi Mitra Baperlitbang
20	Rehab Gedung TK PERTIWI, Rehab Gedung MI AL MA'ARIF GELANG	Desa Gelang	Bangunan Yang sudah Rapuh		Validasi Mitra Baperlitbang
21.	Pengadaan Alat Musik Kesenian Tradisional/Gamelan	Desa Gelang	Alat Sudah Rusak dan Tidak Memiliki Gedung Latihan		Validasi Mitra Baperlitbang

			Tersendiri sangat minim		
22.	Alat Sudah Rusak dan Tidak Memiliki Gedung Latihan Tersendiri	Desa Gelang	Meningkatkan cakupan jamban sehat		Validasi Mitra Baperlitbang
24.	Pelatihan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Desa Gelang	Perlu adanya pelatihan Usaha Ekonomi Produktif		Validasi Mitra Baperlitbang
25.	Pelatihan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Desa Gelang	Gedung PKD Sudah Rusak Berat		Validasi Mitra Baperlitbang
26.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab curvert, drainase, prasarana jalan lainnya))	Desa Gelang	Ruas jalan desa mulai rusak		Validasi Mitra Baperlitbang
27.	Pengadaan Jambanisasi	Desa Kincang	Mendesak		Validasi Mitra Baperlitbang
28.	Pembangunan jalan Kabupaten Kincang - purwonegoro	Desa Kincang	Mendesak		Validasi Mitra Baperlitbang
29.	Rehabilitasi gedung PAUD Dusun 04 dan Dusun 05	Desa Kincang	Mendesak		Validasi Mitra Baperlitbang
30.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun 05 dan Dusun 03	Desa Kincang	Mendesak		Validasi Mitra Baperlitbang
31.	Pembangunan Pagar dan paving SDN 1 Kincang	Desa Kincang	Mendesak		Validasi Mitra Baperlitbang

32.	Renovasi Gedung PKD	Desa Kincang	Mendesak		Validasi Mitra Baperlitbang
33.	Pembangunan Gedung Serba Guna	Desa Kincang	Mendesak		Validasi Mitra Baperlitbang
34.	Jambanisasi PIK Pembangunan Jalan Tembus Kincang Adipasir Bandingan	Desa Kincang	Mendesak		Validasi Mitra Baperlitbang

2.5. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun awal dalam RPJMD Tahun 2024-2028. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2024 disusun guna mendorong capaian target RPJMD Tahun 2023-2026 yang harus diselesaikan pada akhir periode. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka RKPD Tahun 2024 selain menjadikan RPJMD Tahun 2023-2026 sebagai dasar penentuan prioritas sasaran pembangunan, juga disusun sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian target RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 maupun RKP Tahun 2024.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

3. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Penegakan hukum nasional;
 - c. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan
 - d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk Kecamatan adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 14 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 1. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan;
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 Kegiatan yang diarahkan pada Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 7 sub kegiatan yaitu :
1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, Visi dan Misi Bupati Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Visi yang akan dicapai adalah “**BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN**”

Misi yang akan dilaksanakan merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya adalah :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat ;

2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;
3. **Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;**
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar;

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dalam mencapai Visi Kabupaten Banjarnegara, maka Kecamatan Rakit mempunyai peran dan fungsi menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan. Terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Misi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Rakit sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dari empat misi tersebut adalah **Misi Ketiga** yaitu :

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab ;

Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Rakit Tahun 2023-2026.

Kecamatan Rakit menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Rakit dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

3.3 Program dan Kegiatan

**4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Rakit

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Rakit

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Pro gra m	Keluar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiat an				Tolo k Ukur	Target				
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN												
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.068.424.260							
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.653.000							
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec Rakit	100 %	8 dok	1 tahun	1.508.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersusunnya dokumen perencanaan	100%	1.508.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	Kec Rakit	100 %	14 lap	1 tahun	2.145.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	2.145.000

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusun											
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.827.408.886							
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec Rakit		14 ASN	1 tahun	1.784.692.886		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.795.000.000	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec Rakit		7 orng		40.596.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	40.596.000	
7	1	1	2.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec Rakit		7 lap		2.120.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	2.120.000	

7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Rakit		4 unit		45.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	45.000.000
7	1	1	207	11	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec Rakit						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			
7	1	01	207	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec Rakit						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu			
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							59.092.416						
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan	Kec Rakit		12 lap		6.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	6.000.000

					Pelayanan Umum														
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non-usaha	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Jumlah bulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Rakit							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nont-perizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan		Kec Rakit		1 dok		3.600.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	3.600.000
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan		Kec Rakit		1 dok		59.436.700			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	59.436.700

7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Porsentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec Rakit						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							58.910.000							
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun	Kec Rakit		1 dok		1.350.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.350.000	
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Rakit		1 dok		5.925.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.925.000	

7	1	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Prosentase pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kec Rakit		1 desa		25.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
7	01	06	201	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa		Kec Rakit						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
7	01	06	201	11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		Kec Rakit		1 dok		5.925.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.925.000
7	1	06	2.01	11	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Kec Rakit		1 dok		7.260.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	7.260.000

					Pembangunan Desa		an Desa	Pemerintahan Desa										
7	1	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyusunan program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Rakit		1 dok		5.925.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.925.000
7	1	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan desa	Jumlah Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Rakit		1 dok		7.525.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	7.525.000
													2.213.000.000					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan Sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 kegiatan yang diarahkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 14 sub kegiatan;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana dan Sarana Pelayanan Umum; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Koordinasi Pemeliharaan Prasana dan sarana Pelayanan Umum Dengan 3 sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dengan 7 sub kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : Juli 2023



Plt. CAMAT RAKIT

SITI IZZATI, S.Sos

Penata Tk.I

NIP.19710310 199311 2 002
